

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Konsep Pengembangan BUMDes

a. Pengertian Pengembangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengembangan merupakan proses, cara, perbuatan mengembangkan.¹ Penjelasan lebih jelasnya dipaparkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karya WJS Poerwarminta, bahwa pengembangan adalah perbuatan menjadikan bertambah, berubah sempurna (pikiran, pengetahuan dan sebagainya).²

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002, pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidan dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru. Pengembangan secara umum berarti pola pertumbuhan, perubahan secara perlahan dan bertahap.

¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, 2014), hal.201

² Sukirman, *Pengembangan Media Pembelajaran* (Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani, 2012), hal. 23

Menurut Seels dan Richey, pengembangan adalah proses menterjemahkan atau menjabarkan spesifikasi rancangan kedalam bentuk fitur fisik. Sedangkan menurut Tessmer dan Richey, pengembangan lebih memusatkan perhatiannya tidak hanya pada analisis kebutuhan, tetapi juga isu-isu luas tentang analisis awal sampai akhir seperti analisis kontekstual.³

Berdasarkan dari uraian tersebut, pengembangan merupakan suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi suatu produk. Pengembangan dapat berupa proses, produk, dan rancangan. Pengembangan bertujuan untuk menghasilkan produk berdasarkan temuan-temuan uji lapangan. Dalam konteks pengembangan sebuah Badan Usaha utamanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) perlu diperhatikan analisis kebutuhan dan analisis proses dan rancangan dari awal hingga akhir. Pentingnya menganalisis pengembangan BUMDes tersebut guna untuk melihat sejauh mana BUMDes dapat mempengaruhi peningkatan perekonomian pada tiap Desa. Karena berdasarkan dari pemanfaatan sumber daya alam yang ada, BUMDes merupakan salah satu faktor utama penggerak perekonomian bagi masyarakat guna menuju kehidupan yang lebih baik.

³Alim Sumarno, *Perbedaan Penelitian dan Pengembangan*, (Surabaya: Elearning UNESA, 2012)

b. Faktor-faktor yang Menghambat Pengembangan BUMDes

Pengembangan Badan Usaha Milik Desa sebagai penggerak ekonomi masyarakat sampai saat ini masih menghadapi banyak sekali kendala yaitu:

1) Kepemimpinan Manajerial dan Tata Kelola (KMT)

Merupakan faktor utama dalam menentukan hambatan pengembangan. Jika kepemimpinan manajerial dan tata kelola sangat buruk, maka BUMDes akan mengalami kemerosotan yang lumayan tajam.

2) Skala dan Jangkauan Badan Usaha

Badan Usaha Milik Desa yang menjalankan bisnis eksternal seperti produksi dan distribusi hasil pertanian keluar Desa, umumnya rentan dan mudah gulung tikar dikarenakan skala ekonomi yang kecil dan kapasitas ekonomi yang sangat terbatas.

3) Emansipasi Lokal

Badan Usaha Milik Desa yang tumbuh dari emansipasi lokal (persamaan derajat secara lokal) jauh lebih kuat dan berkelanjutan dibandingkan dengan Badan Usaha yang lahir dari pemerintah daerah. Badan Usaha Milik Desa yang lahir karena pemerintah daerah umumnya berjalan tidak sesuai angan-angan. Pandangan dari masyarakat sekitar adalah bahwa BUMDes adalah proyek pemerintah, seperti halnya proyek lain

yang masuk ke Desa. Sehingga kepercayaan dan daya lekat BUMDes kepada masyarakat sangat lemah.

4) Kerjasama

Tidak adanya kerjasama ataupun tidak menjalin hubungan kerjasama yang baik antar Badan Usaha Milik Desa akan menghambat pertumbuhan BUMDes itu sendiri.

5) Tradisi Desa

Dengan tidak adanya tradisi berdesa seperti tidak adanya tradisi solidaritas, kerjasama, swadaya dan gotong royong akan menghambat pengembangan Badan Usaha Milik Desa.⁴

2. Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

a. Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari kata *deca* menurut sanskerta yang merupakan tanah air atau tanah kelahiran. Desa atau *udik* adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (*rural*). Di Indonesia, istilah desa merupakan pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa.

Desa menurut Widjaja menyatakan bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan

⁴Welli Indra Mayu, *Faktor-faktor yang Menghambat Tumbuh dan Berkembangnya Badan Usaha Milik Desa di Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014-2015*, (eJournal Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Vol. 3 No.2, 2016), hal. 5-6

pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.⁵ Menurut Bintarto, desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat dalam suatu daerah dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.⁶

Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷

b. Pengertian Badan Usaha

1) Pengertian Badan Usaha

Badan usaha adalah semua jenis kelembagaan baik yang bersifat mengejar laba maupun yang tak mengejar laba. Semua hal yang berhubungan dengan tujuan badan usaha akan ditemukan berbagai ragam bentuk tergantung siapa yang mendirikan, apa tujuan dan misinya, motif pendiriannya. Istilah badan usaha bersifat umum dan menyangkut makna yang lebih

⁵Widjaja, HAW, *Pemerintahan Desa/Marga*, (Jakarta: PT. Raga Grafindo Persada, 2013), hal. 13

⁶Icuk Ranga Bawono, *Optimalisasi Potensi Desa di Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2019), hal. 122

⁷Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Penjelasan mengenai Desa

luas. Dengan demikian badan usaha adalah seluruh jenis kelembagaan yang sedang menjalankan usaha baik individu maupun kelompok yang memiliki visi, misi dan tujuan yang sama dalam bentuk hukum tertentu.⁸

2) Fungsi Badan Usaha

Fungsi badan usaha adalah membudidayakan sumber daya atau potensi desa dan dana dalam masyarakat dan diarahkan ke pendaayagunaanya bagi pemenuhan tujuan badan usaha itu sendiri. Fungsi lain dari badan usaha adalah merupakan suatu bentuk kelembagaan dalam masyarakat yang dapat menyalurkan segala gagasan, dan peran serta anggota masyarakat dalam bentuk karya kreatif yang memberikan kemaslahatan bagi kehidupan sosial.⁹

c. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa untuk kesejahteraan masyarakat Desa. Dimana hal itu sudah ditetapkan ke dalam peraturan desa yang dibuat dan disahkan. peraturan Desa merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati

⁸Nurochim dan Iwan Purwanto, *Manajemen Bisnis*, (Ciputat: Lembaga Penerbitan, 2010), hal.77

⁹Ernia Tisnawati dan Kurniawan, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media group, 2005), hal. 8

bersama Badan Permusyawaratan Desa. Modal awal pembentukan BUMDes berasal dari dana APBDes. Dana BUMDes tidak hanya berasal dari Dana Desa melainkan boleh berasal dari pihak ketiga dengan cara investasi ke dalam BUMDes tersebut tetapi dengan tetap memperhatikan pasal-pasal nya agar tidak merugikan BUMDes kedepannya.¹⁰

Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga berbasis ekonomi yang dijalankan oleh desa dan masyarakat sebagai sara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Menurut Ratna Aziz, peran BUMDes untuk desa adalah sebagai mendorong pemerintah desa untuk mengembangkan potensi desa yang ada. Selain itu peran BUMDes adalah mensejahterakan masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes sehingga mengurangi angka pengangguran dalam desa tersebut yang berdampak positif yaitu makmur dan sejahtera.¹¹

d. Tujuan Pendirian BUMDes

Pendirian BUMDes bertujuan sebagai usaha menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh Desa atau kerja sama antar-Desa. Didirikannya BUMDes pada setiap desa bertujuan untuk memperkuat pendapatan desa dan sebagai faktor utama penggerak

¹⁰ Peraturan Desa Campurdarat Tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

¹¹Ratna Aziz Prasetyo, *Peranan BUMDes Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Bojonegoro*, (Jurnal Dialektik: Universitas Airlangga, 2016)

perekonomian di desa. Seperti halnya pada unit usaha sektor riil atau pertokoan yang dijalankan oleh BUMDes, yang nantinya masyarakat dapat menitipkan produk usaha rumahan di pertokoan BUMDes dan dapat mempekerjakan masyarakat sekitar guna untuk menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran dalam mengembangkan dan memajukan BUMDes.

Menurut Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia BAB II Pasal 3, Nomor 4 tahun 2015, tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Menyebutkan beberapa tujuan pendirian BUMDes yaitu:

- 1) Meningkatkan perekonomian suatu Desa, dengan adanya BUMDes diharapkan masyarakat mampu meningkatkan perekonomiannya, yaitu dengan cara ikut serta dalam kegiatan BUMDes.
- 2) Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa, aset Desa bisa lebih dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran suatu Desa.
- 3) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa, dengan adanya BUMDes di tengah-tengah masyarakat desa yaitu untuk meningkatkan usaha masyarakat yang terkendala dengan modal.

- 4) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat.
- 5) Membuka lapangan pekerjaan, BUMDes mampu memfasilitasi bagi masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari pekerjaan untuk diberdayakan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 6) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa.
- 7) Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa, BUMDes mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dengan adanya lapangan pekerjaan, maka pendapatan masyarakat meningkat dan hasilnya dibagi dengan pendapatan asli desa dengan bagi hasil.¹²

e. Modal Awal BUMDes dan Manfaat BUMDes

Berdasarkan Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 4 tahun 2015, tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, pada Bab III pasal 17 tentang Modal BUMDes yaitu BUMDes modalnya bersumber dari APB Desa, dimana dalam APBDes sudah dianggarkan untuk

¹²Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 4 tahun 2015, tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

keperluan BUMDes atau operasional BUMDes guna meningkatkan unit usaha BUMDes.¹³

Selain dari dana APBDes, modal BUMDes terdapat dari modal desa, seperti hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan, bantuan pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan atau lembaga donatur yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa yang semuanya disalurkan melalui mekanisme APB Desa, serta aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang Aset Desa.

Selanjutnya pada Bab X pasal 89 dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 6 tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa hasil dari BUMDes dapat di manfaatkan untuk pengembangan usaha, artinya BUMDes hadir untuk mengembangkan usaha-usaha masyarakat desa agar lebih meningkat lagi. Selain dari pengembangan usaha juga hasil BUMDes bisa dimanfaatkan untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan

¹³ *Ibid.* , Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal

Belanja Desa yang berdampak pada peningkatan perekonomian suatu Desa.

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk diuraikan agar dipahami dan diterima dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Dijabarkan sebagai berikut.

- 1) Kooperatif. Semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- 2) Partisipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- 3) Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- 4) Transparan. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- 5) Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.

- 6) **Sustainabel.** Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.¹⁴

3. Konsep Peningkatan Perekonomian

a. Peningkatan Ekonomi

Peningkatan berasal dari kata dasar tingkat yang berarti proses atau cara, perbuatan. Sedangkan peningkatan adalah hasil dari cara dalam meningkatkan suatu usaha. Peningkatan menurut Adi S berasal dari kata tingkat, yang berarti lapis atau lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan. Tingkat dapat berarti pangkat, taraf dan kelas. Peningkatan berarti kemajuan, tingkat dan kualitas maupun kuantitas.¹⁵ Peningkatan merupakan kemajuan atau adanya tingkatan yang akan atau sudah dicapai dengan pengelolaan pikiran, fisik, maupun rohani yang dimiliki setiap manusia. Pengertian peningkatan secara epistemologi adalah menaikkan derajat taraf dan sebagainya mempertinggi memperhebat produksi dan sebagainya.¹⁶

Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa.¹⁷

¹⁴ Deppennas PKDSP, *Buku Panduan BUMDes*, (Jakarta: PP-RPDN ,2007), hal.13

¹⁵ Yandri Pagapong, *Peningkatan Disiplin Kerja Pegawai pada Kantor Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loajan Ilir Samarinda Seberang*, (eJournal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, No. 3, 2015), hal. 3

¹⁶ Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta : Modern Press, 1995), hal. 160.

¹⁷ Deliarnov, *Ekonomi Politik*, (Jakarta : Erlangga, 2006), hal 21.

Menurut Putong Iskandar, ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu *oikos* yang berarti peraturan rumah tangga. Ekonomi adalah semua hal yang menyangkut kehidupan rumah tangga, arti dari rumah tangga disini merupakan hal yang luas yaitu rumah tangga bangsa, Negara dan dunia.¹⁸ Jadi peningkatan ekonomi merupakan proses perubahan perekonomian menuju yang lebih baik. Dengan adanya peningkatan perekonomian merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam kesejahteraan, dan makmurnya perekonomian dalam daerah tersebut.

b. Peningkatan Ekonomi Menurut Islam

1) Ekonomi Islam

Menurut Abdul Manan, ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sedangkan menurut Umer Chapra, ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam ranah pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu tanpa keseimbangan lingkungan.¹⁹

¹⁸ Putong Iskandar, *Economics Pengantar mikro dan Makro*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), hal. 1

¹⁹ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal 2.

Ekonomi merupakan kebutuhan yang mendasar dalam aspek kehidupan untuk bisa hidup dan berkembang dalam kehidupan sehari-harinya. Berdasarkan dari paparan beberapa ilmuwan diatas dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang masalah ekonomi berdasarkan realita yang ada yang berbasis Islam yang didasari oleh Al-qur'an, sunnah, ijmak, dan qiyas. Oleh karenanya masyarakat memperhatikan bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup dan menggunakannya sesuai dengan ajaran Islam.

2) Prinsip-prinsip Dasar Ekonomi Islam

Secara mendasar ekonomi Islam berbeda dengan system ekonomi yang lain dalam hal tujuan, bentuk, dan pengaplikasiannya. Ekonomi Islam lebih berdsar pada Al-qur'an dan Hadist untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia dan akhirat. Nilai yang terkandung dalam ekonomi Islam disebutkan sebagai berikut.

a. Nilai dasar kepemilikan

Setiap orang atau badan dituntut kemampuannya untuk memanfaatkan sumber-sumber ekonomi. Lama kepemilikan manusia atau suatu benda terbatas pada lamanya manusia hidup di dunia. Dan sumber daya yang

menyangkut kepentingan umum harus menjadi milik umum, bukan milik perorangan.

b. Nilai dasar keseimbangan

Keseimbangan yang terwujud dalam kesederhanaan, hemat, dan menjauhi sikap pemborosan.

c. Nilai dasar keadilan

Nilai dasar keadilan sangat penting dalam ajaran Islam. Oleh karenanya, keadilan harus diterapkan dalam kehidupan ekonomi seperti proses distribusi, produksi, konsumsi, dan lain sebagainya. Keadilan juga harus diwujudkan dalam pengalokasian sejumlah hasil kegiatan ekonomi bagi orang yang tidak mampu memasuki pasar melalui zakat, infak, dan hibah.

Selain dari nilai dasar yang disebutkan diatas, islam memiliki nilai instrumental yaitu; Zakat, Larangan Riba, Kerjasama Ekonomi, dan Jaminan Sosial. Jika nilai instrumental tersebut dilaksanakan, maka akan terwujud sistem ekonomi yang seimbang menguntungkan dan menyejahterakan semua pihak.²⁰

²⁰ *Ibid.*, hal. 3-10

3) Peningkatan Menurut Ekonomi Islam

Peningkatan menurut Adi S berasal dari kata tingkat, yang berarti lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan. Tingkat dapat berarti pangkat, taraf dan kelas. Peningkatan berarti kemajuan, tingkat dan kualitas maupun kuantitas. Islam menawarkan suatu penyelesaian atas masalah dan menyelamatkan kualitas peningkatan, Islam mengajarkan bersikap rendah hati dan manusia adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya. Prinsip utama dalam konsep peningkatan menurut pandangan Islam adalah Manusia di beri ilmu akal dan hati untuk terus meningkatkan kemampuannya dari segi teori maupun prakteknya. Peningkatan dapat berupa peningkatan ilmu, peningkatan finansial serta peningkatan religius. Sistem dalam ekonomi islam merupakan sistem yang adil dan merata dalam mengembangkan dirinya menjadi yang lebih baik. Islam memberikan kebebasan dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya dengan berlandaskan pada norma agama dan budaya yang telah di jelaskan melalui syariat Islam.²¹ Islam menekankan perlunya membagi kekayaan kepada masyarakat melalui kewajiban membayar zakat, mengeluarkan infak, serta shodaqoh. Islam adalah agama yang luas kegiatan muamalah adalah kegiatan dianjurkan oleh Islam, dengan adanya

²¹Afi Fuddin Lutfi, *Pengembangan Potensi Pasar Tradisional dalam Peningkatan Ekonomi Pedagang di Pasar Bandung Kabupaten Tulungagung Perspektif Ekonomi Islam*, (Tulungagung : Skripsi Tidak Diterbitkan, 2020), hal. 28

muamalah atau kegiatan ekonomi diharapkan pemerataan pendapatan dapat terasa secara merata. Usaha yang dilakukan oleh manusia secara fisik maupun mental dalam peningkatan dirinya dalam rangka menghasilkan produk dalam bentuk barang maupun jasa. Hasil produk ini nilainya ditukar dengan kemampuan menambah manfaat atas barang dan jasa yang ada.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Ekonomi

Peningkatan ekonomi seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1) Tanah dan kekayaan alam

Kekayaan alam akan dapat mempermudah usaha untuk meningkatkan maupun mengembangkan perekonomian, terutama pada masa-masa permulaan proses dari pertumbuhan ekonomi. Kekayaan alam suatu negara meliputi luas dan kesuburan tanah, keadaan iklim dan cuaca, jumlah dan hasil hutan dan hasil lautan yang diperoleh, jumlah dan jenis kekayaan barang tambang.²² Sumber daya alam merupakan bahan baku mentah yang tersedia di seluruh dunia, kekayaan alam dapat difungsikan sebagai sumber pendapatan tetap dalam jangka waktu tertentu untuk kepentingan masyarakat.

²² Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hal. 429

2) Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja

Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat kepada peningkatan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dan penambahan tersebut memungkinkan negara ini menambah produksi.²³ Pertambahan penduduk menunjukkan bahwa suatu negara mengalami perkembangan penduduk, perkembangan penduduk belum tentu meningkatkan kualitas penduduk tersebut

3) Barang-barang modal dan tingkat teknologi

Barang-barang modal penting artinya dalam mempertinggi keefesienan pertumbuhan ekonomi. Masyarakat yang belum maju sekalipun barang-barang modal sangat besar peranya dalam kegiatan ekonomi.²⁴ Barang modal atau aset yang dimiliki saat berwiraswasta sangatlah penting barang modal dapat berupa alat, mesin, tanah, maupun gedung untuk melakukan kegiatan membuat suatu barang atau jasa.

4) Sistem sosial dan sikap masyarakat

Sistem sosial dan sikap masyarakat penting peranya dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Sikap masyarakat menentukan sampai dimana pertumbuhan ekonomi dapat dicapai. Sikap masyarakat yang mampu memberikan dorongan

²³ *Ibid.*, .hal. 430

²⁴ *Ibid.*, hal. 431

dalam pertumbuhan ekonomi, sikap yang selalu berusaha untuk menambah pendapatan yang diharapkan.²⁵ Maju atau mundurnya suatu negara dapat dilihat dari sistem sosial dan sikap masyarakat, dalam kegiatan ekonomi sikap yang disiplin serta menjunjung tinggi kesetaraan gender merupakan kegiatan yang harus dilakukan setiap harinya, serta lambatnya pertumbuhan penduduk.

d. Peran Pemerintah dalam Perekonomian

Ada tiga fungsi pokok yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam perekonomian. Yaitu efisiensi, keadilan, dan stabilitas.

1) Efisiensi

Dalam suatu sistem persaingan, banyak perusahaan yang tidak mengetahui teknik produksi yang menghasilkan barang dengan biaya paling murah, sehingga biaya-biaya produksi tidak mencapai angka minimum.

2) Keadilan

Perekonomian berlangsung dengan efisiensi penuh yaitu selalu berada pada batas kemungkinan produksi yang efisien. Selalu menghasilkan barang pribadi dan fasilitas umum dengan jumlah yang tepat.

²⁵ *Ibid.*, hal. 432

3) Stabilitas

Selain fungsinya sebagai penunjang efisiensi dan keadilan, pemerintah terlibat pula fungsi makronya untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Pemerintah seringkali terperangkap dalam inflasi (harga-harga umum melonjak) dan depresi (pengangguran meluas).²⁶

Selain itu, peran pemerintah dalam mempertahankan dan meningkatkan lajur perekonomian pada tiap-tiapdesa dengan membentuk Badan Usaha pada suatu desa. Badan usaha merupakan mitra pemerintah dalam meningkatkan ekonomi secara nasional. Banyak sekali peran yang dapat dilakukan Badan Usaha antara lain sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam pemerataan pendapatan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²⁷

B. Penelitian Terdahulu

Dengan adanya kajian penelitian terdahulu yang bertujuan sebagai bahan kepustakaan dan referensi serta pertimbangan terhadap sebuah penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu guna dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

²⁶ Rahardjo Adisasmita, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gaha Ilmu, 2015), hal. 18-20

²⁷ Alam, *Ekonomi*, (Jakarta: PT. Gelora Aksra Pratama, 2007), hal. 175

Munawaroh²⁸ dengan judul penelitian “Analisis Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Desa Majasari Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu). Jika melihat dari sumber daya alamnya sendiri, sebenarnya Desa Majasari mampu untuk menjadi wilayah yang mandiri dan mampu untuk memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakatnya. Dalam mengentaskan kemiskinan di desanya tentulah terdapat program-program dari pemerintah desa agar kemiskinan berkurang dan kesejahteraan meningkat. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan salah satu solusinya ialah dengan terbentuknya Badan Usaha, dimana badan usaha ini berfungsi untuk memberdayakan masyarakat yang masih belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan dan meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Majasari. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program-program BUMDes Majasari yang masih aktif diantaranya: simpan pinjam, pengelolaan sampah, peternakan, usaha perdagangan seperti PPOB, produk masyarakat, dan pembuatan cenderamata yang mampu memberdayakan masyarakat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian walaupun belum signifikan. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu meneliti tentang

²⁸Munawaroh, Skripsi: “*Analisis Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Desa Majasari Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu)*”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

program-program BUMDes yang masih aktif yang berdampak pada perekonomian masyarakat sekitar. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah peneliti Munawaroh meneliti tentang pengembangan ekonomi, sedangkan penelitian ini meneliti tentang pengembangan BUMDes.

Sari²⁹ dengan judul penelitian “Pengaruh BUMDes Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai”. Mengingat pentingnya badan usaha milik desa bagi masyarakat desa untuk mengembangkan ekonomi desa, maka di tetapkan desa memperoleh bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten/kota yaitu berupa dana desa yang di salurkan kepada BUMDes guna untuk mengembangkan ekonomi desa di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Dengan adanya BUMDes maka diharapkan ekonomi desa dapat berkembang dilihat dari tingkat pendapatan masyarakat desa dan penyerapan tenaga kerja masyarakat desa. BUMDes ada karena adanya kegagalan pasar yang terjadi, maka dari itu pemerintah membentuk BUMDes sebagai bentuk pemerintah untuk mengembangkan potensi desa dan mengembangkan ekonomi desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah keberadaan Badan Usaha Milik Desa sudah sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Serdang Bedagei yang kemudian diatur oleh desa dengan peraturan desa

²⁹Andriani Sari, Skripsi: “Pengaruh BUMDes Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai”, (Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara)

mengenai Badan Usaha Milik Desa. Dan dengan adanya BUMDes berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi desa. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu meneliti tentang dampak perekonomian masyarakat melalui BUMDes. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti tersebut meneliti tentang pengaruh BUMDes terhadap pengembangan ekonomi suatu Desa, sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang pengembangan suatu BUMDes terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.

Rismawati³⁰ dengan judul penelitian “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perwitasari Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Minapolitan Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal”. Pengembangan kawasan minapolitan biasanya berpusat pada wilayah pedesaan, salah satunya dengan mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan produksi perikanan tangkap maupun budidaya sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan sentra-sentra produksi dan pemasaran berbasis perikanan sangat mempengaruhi perekonomian di sekitar kawasan. BUMDes Perwitasari merupakan lembaga pemerintah desa Tambaksari yang menaungi kegiatan dalam sektor perikanan dan pengolahan. Pembangunan pengembangan pedesaan ini juga menjadi daya tarik pemerintah pusat. Desa Tambaksari dinobatkan sebagai desa wisata

³⁰ Rismawati, Skripsi: “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perwitasari Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Minapolitan Desa Tambaksari Kecamatan Rowoksari Kabupaten Kendal”, (Semarang: UIN Walisongo Semarang)

diwilayah kendal berbasis pada potensi lokal. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan BUMDes Perwitasari dalam meningkatkan perekonomian sudah baik dalam pelaksanaannya. Seiring perkembangannya BUMDes Perwitasari juga meningkatkan kesehatan lingkungan pada Masyarakat Desa Tambaksari. Disamping itu, pelaksanaan BUMDes Perwitasari belum dikelola secara maksimal karena ada yang perlu diperbaiki pada aspek sumber daya manusia dan finansial serta lemahnya sosialisasi dan maraknya pesaing pada kegiatan yang sama. Rekomendasi yang diberikan adalah membuat payung hukum, meningkatkan kualitas dan kualitas sumberdaya manusia, meningkatkan sumberdaya finansial, sosialisasi lebih merata dan memahami karakteristik pesaing sehingga pemberdayaan dan peran aktif masyarakat dapat ditingkatkan. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu meneliti tentang peningkatan perekonomian Desa melalui peran BUMDes. Sedangkan perbedaannya, penelitian tersebut lebih terfokus pada pengembangan kawasan minapolitan yang dimana berpusat pada wilayah pedesaan, dengan mewujudkan pembangunan berkelanjutan suatu desa. Sedangkan pada penelitian ini terfokus pada peningkatan suatu desa secara menyeluruh dengan adanya pengembangan BUMDes yang sedemikian rupa.

Sakina³¹ dengan judul penelitian “Perencanaan Strategis Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam Rangka Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa (Studi pada BUM Desa Wahana Lestari, Desa Babadan, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung). Dalam perjalanan keberadaan BUM Desa Babadan ini mengalami beberapa kendala yaitu terkait dengan perencanaan, pengelolaan dan pengembangan BUM Desa. Untuk menghindari timbulnya masalah-masalah tersebut, maka perencanaan strategis BUM Desa merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan. Sehingga melalui perencanaan strategis, maksud dan tujuan BUM Desa dalam pembangunan ekonomi dapat tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan strategis BUM Desa Wahana Lestari dalam rangka pembangunan ekonomi masyarakat Desa Babadan serta kontribusi BUM Desa Wahana Lestari dalam rangka pembangunan ekonomi masyarakat Desa Babadan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Analisis data menggunakan model analisis data Creswell. Hasil dari penelitian ini menggunakan bahwa perencanaan strategis Bum Desa Wahana Lestari telah dilaksanakan dengan cukup baik. Hal tersebut dilihat dari ketujuh tahap perencanaan strategis yang dilakukan oleh BUM Desa Wahana

³¹ Fadhila Putri Sakina, Skripsi: “*Perencanaan Strategis Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Dalam Rangka Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa (Studi Pada BUM Desa Wahana Lestari, Desa Babadan, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung)*”, (Malang: Universitas Brawijaya Malang)

Lestari. Sementara BUM Desa Wahana Lestari belum banyak berkontribusi dalam pembangunan ekonomi masyarakat Desa Babadan. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu meneliti tentang perencanaan pengelolaan dan pengembangan BUMDes. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian tersebut lebih terfokus pada pembangunan ekonomi masyarakat sedangkan pada penelitian ini terfokus pada peningkatan ekonomi suatu desa.

Atmojo³² dengan judul penelitian “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi”. Dengan adanya BUMDes dijadikan sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa dan nantinya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Di samping itu pemerintah desa juga harus mampu berpola kreatif dan inovatif dalam mendominasi kegiatan ekonomi desa melalui BUMDes sehingga dapat membangun perekonomian daerah khususnya desa tertinggal atau desa yang tingkat perekonomiannya rendah. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berharap adanya pembentukan dan pengelolaan BUMDes disetiap desa, akan tetapi hanya terdapat beberapa desa yang membentuk dan mengelola BUMdes. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Teknik penentuan informan menggunakan tehnik *purposive sampling* untuk informan pokok dan

³²Singgih Tri Atmojo, Skripsi: “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi), (Jember: Universitas Jember)

metode *Snowball Sampling* untuk informan tambahan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis, dalam menguji keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Hasil dari penelitian ini adalah peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat desa mempunyai tujuan profit atau hasil akhirnya yang di maksud sisa hasil usaha disini nantinya dibagi untuk kepentingan lingkungan dan masyarakat yang tidak mampu (janda dan anak yatim). BUMDes bukan hanya sebagai bentuk lembaga sosial saja tapi menjadi lembaga ekonomi yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Peran yang dilakukan oleh pekerja sosial yaitu peran sebagai pemercepat perubahan, peran sebagai perantara, peran sebagai pendidik, peran sebagai tenaga ahli, peran sebagai perencana sosial. Peranan-peranan pemberdayaan ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah yang memerlukan bantuan modal usaha agar bisa memiliki usaha sendiri dengan begitu mereka bisa meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan hidupnya. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu meneliti tentang adanya BUMDes yang dijadikan sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian tersebut lebih membahas secara mendalam mengenai kesejahteraan masyarakat desa dengan adanya BUMDes, sedangkan pada penelitian ini hanya terfokus pada peningkatan perekonomiannya saja.

C. Kerangka Konseptual

Masalah bagi semua elemen masyarakat terutama masyarakat perdesaan merupakan pendapatan perekonomian yang tergolong rendah karena banyaknya angka pengangguran di desa tersebut, dan efektivitas ekonomi yang tidak berkembang di wilayah perdesaan. Oleh karena itu, perlu adanya peran pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah guna untuk mengatasi masalah perekonomian pada suatu desa. Dimana masyarakat di berdayakan guna meningkatkan perekonomiannya dengan membuat Badan Usaha, nama badan usaha ini yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Selain itu pengembangan BUMDes juga sangat diperlukan guna untuk memajukan BUMDes agar dapat meningkatkan perekonomian Desa. Setelah pemerintah desa membuat BUMDes dan mengembangkan BUMDes dengan sedemikian rupa, maka seluruh aktifitas kegiatan BUMDes dianalisis terutama pada program-program unit usaha BUMDes dalam meningkatkan perekonomian, dan hasil dari analisis tersebut ialah perekonomian di Desa Campurdarat terbukti berhasil meningkat atau tidak sama sekali dengan adanya pengembangan yang telah dicapai BUMDes Mulia Mandiri.